

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aliyth Prakarsa. 2023. *Hukum Pidana Adat*. Jakarta: Kencana.
- Anto Soemarman. 2003. *Hukum Adat dalam Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2023. *Hukum Pidana dan Peradilan Pidana*. Jakarta: LPPM Press UPN Veteran Jakarta.
- Barda Nawawi Arif. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister Universitas Diponegoro.
- Benny Simon Tabalujan. 2001. *Legal Development in Developing Countries (The Role of Legal Culture)*. Singapore.
- Busyra Azheri, et al., 2023. *Dari Hukum Adat Untuk Pembangunan Hukum Nasional*, Serang: Untirta Press Bekerja Sama Dengan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Ptn Wilayah Barat.
- Dyah Irawati and Hiniwati Widjaja. 2006, *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani Di Sentani, Kabupaten Jayapura)*, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press.
- Dominikus Rato. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Eddy Hiarij. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- E. Utrecht, 1994. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

- Esmi Warassih Pujirahayu. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- I Gusti Ketut Sutha, 1987. *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty.
- Iman Sudiyat, 2010, *Hukum Adat: sketsa asas*, Yogyakarta: Liberty.
- Lawrence Meir Friedman. 1975. *The Legal System. A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum pidana adat: Kajian asas, teori, norma, praktik, dan prosedur*, Bandung: Alumni.
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry. 2004. *Essential Criminology*. Colorado: Second Edition Westview.
- Mark S. Umbreit. 2000. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*. The Center for Restorative Justice: University of Minnesota.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roelof H Haveman. 2002. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*. Jakarta: Tata nusa.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1985. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rufinus Hotmalana Hutauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiadi, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta.
- Slamet Pribadi, 2023, *Hukum Pidana Adat (Restorative Justice dalam Sistem Hukum Adat Suku Dayak Tomun)*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Soekanto. 1978. *Pengukuhan guru besar luar biasa dalam Hukum Adat Indonesia pada Universitas Indonesia cabang Makasar pada 19 April 1955, dalam Pokok-pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Soenaryati Hartono. 1981. *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soepomo. 1996. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.

Soerojo Wignjodipuro. 1982. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Wantjik Saleh, 1980, *Seminar Hukum Nasional 1963-1979*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerojo Wignjodipuro. 1982. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.

Topo Santoso. 1990. *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Ersesco.

Yulia, 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh Utara: Unimal Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2015.

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) “*Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economics, social and cultural development*”.

Jurnal

Ade Irawan dan Margo Hadi Pura, 2023, *Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Vol. 7 No. 1, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6453>.

Amnesty International Public Statement, 2016, Indonesia: Criminalization of consensual intimacy or sexual activity for unmarried couples in Aceh must end, Index: ASA 21/5039/2016.

Andri Yanto dan Faidatul Hikmah. 2023. *Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas*. Recht Studiosum Law Review. Universitas Sumatera Utara. Vol. 2 No. 2, <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>.

Armawan, 2024, *Pemberdayaan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan (Transaction Out Of Judiciary)*, jdih.mahkamahagung.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis*. BPHN.

Beniharmoni Harefa. 2018. *Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif*. Jurnal

Komunikasi Hukum (JKH). Volume 4 No. 1,
<https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13657>.

Busyra Azheri, et al., 2023, *Dari Hukum Adat Untuk Pembangunan Hukum Nasional*, Serang: Untirta Press Bekerja Sama Dengan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Ptn Wilayah Barat.

Dyah Irawati and Hiniwati Widjaja, 2006, *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani Di Sentani, Kabupaten Jayapura)*, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press.

I.G.N Sugangga. 2003. *Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol. XXXII No. 2 April-Juni 2003.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024, *Saran dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Konsepsi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup di Masyarakat*, Komnas Perempuan.

Luthfi Ramadhan, et al. 2021. *Posisi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat*. Supremasi. Universitas Negeri Makasar. Vol. 16 No. 2,
<https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i2.21173>.

Patricia Pasapan, et al, 2022, *Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Tutohi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Vol. 2 No. 2, April 2022.

Riyanto. 2022. *Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI*. Skripsi. Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.

Rya Elita Br Sembiring, et al. 2024. *Analisis Tindak Pidana Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana dan Qanun Jinayat di Aceh*, *IBLAM Law Review*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Vol. 4 No. 2,
<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.408>.

Sigit Kamseno, 2023, Jurnal Hukum Makna Asas Legalitas Sebagai Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat dan Penerimaan Norma-Norma Hukum Tradisional, Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, Vol. 1 No. 2, April 2023.

Sri Rahayu, 2014, Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 3 No. 3, September 2014.

Website

<http://www.restorativejustice.org>. diakses pada tanggal 03 April 2024 pukul 12.33 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-living-law-dalam-kuhp-baru--hakim-wajib-gali-nilai-norma-adat-lt65c82df624f54/>. diakses pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 12.40 WIB.

https://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-barang-lama-kemasan-berbeda-mengupas-pemikiran-priyadi?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 28 Februari pukul 12.12 WIB.

<https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/23/qanun-jinayat-becomes-official-all-people-aceh.html>, diakses pada tanggal 6 Maret pukul 09.12 WIB.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151023_indonesia_pember_lakuan_jinayah, diakses pada tanggal 6 Maret pukul 10.12 WIB.

https://www.brin.go.id/news/119402/peneliti-brin-gagas-peran-lembaga-adat-dalam-mediiasi-penal?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal 14 Maret 2025 pukul 09.40 WIB.